

PENJELASAN TABEL PENGUKURAN IKU BIRO ORGANISASI TAHUN 2019 sd 2022 BANDINGKAN DENGAN CAPAIAN DAN TARGET PADA RPJMD PROVINSI PAPUA

PROGRAM PENGUARAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

1. Bahwa nilai/skor SAKIP TA 2022 oleh KEMENPANRB belum dirilis /diumumkan karena dalam proses penyusunan dan akan diumumkan pada bulan Juni 2023, Target dengan Skor "BB" telah ditetapkan di RPJMD ataupun di RENSTRA Biro Organisasi, hasil penilaian SAKIP TA 2019 ke TA 2020 ada kenaikan 1,93%, dan hasil penilaian SAKIP 2021 dengan nilai 64,57 % ada kenaikan 0,04 persen dari hasil penilaian LKJ 2020 -perbaikan terus dilakukan sesuai rekomendasi dari MENPAN nilai SAKIP Gubernur Papua agar nilai naik dengan skors "BB" di TA 2022, apakah bisa dicapai tergantung dari komitmen bersama antara provinsi dan Kabupaten Kota sehingga akan optimis pada Tahun ke5 RPJMD akan mendapat Predikat BB hingga Predikat A harus didukung pula dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kab/Kota se Papua dimana untuk Kab/Kota se Papua rata-rata TA 2021 Nilai Akuntabilitas Kinerja nya masih pada level Predikat D, C, sementara yang Predikat CC baru 4 (Tiga) Kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab.Merauke dan Kab.Jayawijaya sementara yang Predikat B baru 1 (Satu) Kabupaten yaitu Kab.Asmat. Sementara syarat untuk mencapai nilai BB sebelum A adalah 1/3 Kab/Kota (kurang lebih 10 Kab) Nilai Akuntabilitas Kinerjanya harus sudah Predikat B sementara realisasinya baru 1 (Satu) Kab yang berpredikat B yaitu Kab.Asmat. Itulah sebabnya mempengaruhi Kinerja Provinsi Papua secara keseluruhan untuk belum dapat sampai pada Predikat BB apalagi Predikat A dan Predikat AA. Prediksi Nilai Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2022 dengan Nilai 65.00 dengan indikator Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD, pemenuhan Administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas dan Implementasi SAKIP.
2. Standar Operasional merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan, yang wajib ditetapkan pimpinan SKPD dan diuji/dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok masing-masing SKPD.dengan adanya PERMENPAN&RB Nomor 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mewajibkan OPD harus menyusun dulu Peta Proses Bisnis untuk menggambarkan hubungan kerja yang efisien dan efektif, adanya PERMENPAN &RB Nomor 26/2020 tentang evaluasi pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, SOP menjadi salah satu penilaian area perubahan dan harus diterapkan pada SKPD , dengan adanya 2 (dua) PERMENPAN tersebut diatas maka penyusunan SOP 28 SKPD atau setara dengan 80 persen dengan capaian sasaran 800 persen, SOP 28 SKPD yang sudah mendapat penetapan perlu dilakukan evaluasi dan penyusunannya melalui dokumen Peta Proses, Sub Peta Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi. Tahun 2022 Biro Organisasi telah mengikuti Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis. Dari Bimtek tersebut berhasil disusun Peta Proses, Sub Peta Proses, Peta Relasi Pemerintah Provinsi Papua dan Peta Lintas Fungsi Biro Organisasi. Berdasarkan Peta Lintas Fungsi Biro Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Bimtek Penyusunan SOP berdasarkan Peta Proses Bisnis. Agar dapat menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mengacu pada pada Peta Lintas Fungsi sementara SKPD Provinsi Papua belum memiliki Peta Lintas Fungsi (kecuali Biro Organisasi), maka pada tahun 2023 ini Biro Organisasi akan memfasilitasi penyusunan Peta Lintas Fungsi bagi 34 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagai dasar menyusun SOP SKPD. Berkaitan dengan Target RPJMD dan RENSTRA untuk Indikator persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur dengan target 100 persen akan dicapai dan diselesaikan pada TA 2023 dengan mengacu pada pedoman PERMENPAN&RB tersebut diatas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada tahun akan 2023 ini SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua akan memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP.

3. Persentase OPD yang memiliki data Uraian Jabatan untuk TA 2021 telah ada dokumen uraian jabatan untuk 35 OPD bahkan telah siap dokumen uraian jabatan untuk 84 UPTD di Provinsi Papua, Target RPJMD 100% pada tiap tahun berjalan RPJMD memberikan motivasi Biro Organisasi untuk segera menyelesaikan tugas penyusunan dokumen uraian jabatan di Provinsi Papua, dengan demikian setiap pejabat akan mengetahui tugas-tugas dalam jabatannya.
4. Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan, dokumen evaluasi jabatan dan analisis jabatan 35 OPD telah 100% selesai dan telah mencapai target RPJMD, hasil penyusunan dokumen juga merupakan rekomendasi dari OPD sehingga Biro Organisasi menindaklanjuti ke Kementerian Pan dan RB dan saat ini hasil evaluasi jabatan di lingkungan Provinsi Papua sudah selesai dan mendapat penetapan persetujuan dari MENPAN dan RB, sesuai (PERMENPAN RB No 34 Tahun 2011), dengan demikian Target RPJMD 95 persen telah diselesaikan 100 persen sesuai target PK Biro Organisasi
5. Capaian indikator Persentase rekomendasi ABK yang ditindaklanjuti target pada RPJMD 70% dan realisasi 100%, maka ada kenaikan 30% capaian kinerja Biro Organisasi dimana penyusunan ABK untuk jabatan struktural selesai dan ditindaklanjuti dengan penyusunan ABK Jabatan fungsional, hasil kinerja Biro Organisasi akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Jayapura, 16 Pebruari 2023


KEPALA BIRO,
SETDA
LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001